

Pengembangan Indeks Wakaf: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Arief Fitrijanto^{1✉}, Bambang Juanda², Sri Mulatsih³, Muhammad Findi⁴

(1,2,3,4) Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Institut Pertanian Bogor, Indonesia

Abstrak: Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih terkendala rendahnya kemandirian fiskal, yang menghambat penyediaan barang publik seperti infrastruktur pendidikan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan menguji Indeks Wakaf Wilayah (IWW) sebagai instrumen pengukur potensi wakaf di tingkat kabupaten/kota guna memetakan sumber pembiayaan sosial alternatif. Mengacu pada kerangka OECD, maka IWW dikonstruksi melalui tiga dimensi: Kesadaran (*Awareness*), Kuantitas (*Quantity*), dan Kapasitas (*Capacity*). Penelitian dilakukan di delapan kabupaten/kota Provinsi Banten menggunakan kombinasi data primer (survei literasi) dan data sekunder (indikator makroekonomi). Analisis data menggunakan metode normalisasi Min-Max dan agregasi rata-rata geometrik. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas wilayah di Banten (62,5%) berada pada kategori "Cukup". Terdapat heterogenitas signifikan; wilayah perkotaan dan pusat industri memiliki indeks lebih tinggi dibandingkan wilayah selatan yang terkendala dimensi kapasitas ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa wakaf strategis sebagai *fiscal supplement* (pendanaan fiskal tambahan) untuk kebutuhan publik mendesak, seperti renovasi sarana pendidikan. Rekomendasi penelitian menekankan penguatan literasi wakaf di wilayah berkapasitas ekonomi tinggi serta peningkatan profesionalitas Nazhir untuk mengoptimalkan realisasi penghimpunan wakaf di daerah.

Article History:

Received: 15 May 2026

Revised: 17 June 2026

Accepted: 18 June 2026

Published: 20 June 2026

Keyword:

Indeks Wakaf Wilayah (IWW), Kemandirian Fiskal, Pembiayaan Sosial Alternatif, Suplemen Fiskal, Infrastruktur Pendidikan

Abstract: *The implementation of regional autonomy in Indonesia is still hampered by low fiscal independence, which hinders the provision of public goods such as educational infrastructure. This study aims to develop and test the Regional Waqf Index (IWW) as an instrument to measure waqf potential at the district/city level to map alternative social financing sources. Referring to the OECD framework (2008), IWW is constructed through three dimensions: Awareness, Quantity, and Capacity. The study was conducted in eight districts/cities in Banten Province using a combination of primary data (literacy surveys) and secondary data (macroeconomic indicators). Data analysis used the Min-Max normalization method and geometric mean aggregation. The results show that the majority of areas in Banten (62.5%) are in the "Sufficient" category. There is significant heterogeneity; urban areas and industrial centers have a higher index than the southern region which is constrained by the economic capacity dimension. This finding confirms the strategic role of waqf as a fiscal supplement for urgent public needs, such as the renovation of educational facilities. Research recommendations emphasize strengthening waqf literacy in high-economic-capacity regions and increasing the professionalism of Nazhir to optimize the realization of waqf collection in the regions.*

Keywords:

Regional Waqf Index (IWW), Fiscal Independence, Alternative Social Financing, Fiscal Supplement, Educational Infrastructure

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



How to cite: Fitrijanto, A., Juanda, B., Mulatsih, S., & Muhammad Findi, M. (2026). Pengembangan Indeks Wakaf: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 4(2), 298–313. <https://doi.org/10.70716/emis.v4i2.526>

PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbarui melalui regulasi terkini, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus urusan

rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan kekhasan wilayah. Namun, realita empiris menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten, masih menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kesenjangan antara kebutuhan belanja daerah untuk penyediaan barang publik dengan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menciptakan celah fiskal yang lebar. Secara geografis, Provinsi Banten memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan ibu kota negara dan menjadi koridor ekonomi penting, namun permasalahan klasik seperti kerusakan ruang kelas sekolah dan infrastruktur dasar masih jamak ditemukan di berbagai titik daerah. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah ini memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah urban-industri seperti Tangerang Raya dengan wilayah periferi seperti Lebak dan Pandeglang yang kapasitas tampung serta akses sekolahnya masih sangat tertinggal (Prabowo, 2025; Purnama dan Djunaidy, 2025).

Kebijakan penyelenggaraan SMA/SMK gratis di Provinsi Banten hingga kini masih terbentur pada dilema keterbatasan anggaran dan defisit infrastruktur. Hambatan ini kian nyata sejak kewenangan pengelolaan dialihkan ke tingkat provinsi, yang mengharuskan pemeliharaan masif atas 1.206 sekolah dengan kondisi gedung yang banyak mengalami kerusakan (Habibi, 2017; Purnama dan Djunaidy, 2025). Mengingat postur APBD konvensional tidak lagi memadai untuk mempercepat pembangunan fasilitas dasar tersebut, realita ketimpangan kronis ini menuntut adanya terobosan kebijakan berupa integrasi sumber pembiayaan nonkonvensional yang berkelanjutan sebagai instrumen suplemen (tambahan) fiskal daerah. Untuk itulah, diperlukan sebuah alternatif instrumen keuangan sosial yang mampu menggerakkan partisipasi publik secara masif tanpa membebani neraca keuangan negara.

Sebagai instrumen filantropi Islam, wakaf menawarkan potensi solusi yang sangat signifikan bagi dinamika pembiayaan daerah tersebut. Secara historis dan teoretis, wakaf telah terbukti mampu menjadi pilar penyangga utama dalam penyediaan layanan publik serta jaring pengaman sosial dalam bentang panjang peradaban Islam. Pemanfaatan dana wakaf untuk pembangunan infrastruktur publik juga mulai mendapat perhatian serius dalam diskursus akademik kontemporer sebagai pelengkap kebijakan fiskal negara (Syafiq, 2018). Di Indonesia sendiri, potensi akumulasi dana ini diproyeksikan sangat besar seiring mendominasinya populasi muslim dan pesatnya pertumbuhan kelas menengah baru di kawasan perkotaan (Nasution, 2005).

Namun, aktualisasi potensi makro yang melimpah tersebut di tingkat lokal sering kali dihadapkan pada realita kapasitas fiskal dan ekonomi antar-daerah yang bersifat heterogen. Tanpa adanya pemetaan yang komprehensif, kebijakan mobilisasi dana sosial keagamaan ini cenderung menjadi tidak tepat sasaran dan kehilangan momentum strategisnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu instrumen pemetaan potensi yang realistis dan multidimensi. Melalui instrumen evaluasi yang terukur, pemerintah daerah dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai profil kekuatan riil potensi wakaf di setiap kabupaten/kota guna menyelaraskan strategi penghimpunan dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Selain masalah pemetaan wilayah, belum terkonversinya potensi wakaf menjadi modal riil pembangunan sosial-ekonomi juga dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas manajerial dan profesionalisme nazhir di level lokal. Sylvanie (2023) menemukan enam penyebab utama rendahnya kecakapan nazhir: kurang keterampilan manajerial, kurang pembinaan/pelatihan,

rekrutmen tidak profesional, paradigma tradisional, masalah legalitas kelembagaan, dan minimnya jumlah nazhir. Di banyak lokasi, nazhir bekerja paruh waktu serta kurang kompeten dalam perencanaan, koordinasi, pemasaran hasil wakaf, keuangan, dan dokumentasi, sehingga aset tidak mencapai target produktif (Ritonga, 2025; Ira, 2022; Sylvianie, 2023). Dampak keterbatasan aspek manajerial nazhir terhadap pemanfaatan aset wakaf ini diikhtisarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dampak pada Pemanfaatan Aset Wakaf terkait aspek manajerial Nazhir

Masalah Nazhir	Dampak pada Aset Wakaf	Sumber
Paradigma tradisional dan tidak kreatif	Wakaf hanya untuk masjid/sekolah, tidak dikembangkan usaha produktif	(Ira, 2022; Putra dan Fildayanti, 2021; Ghani dan Aziz, 2023)
Lemah administrasi dan legalitas	Banyak tanah wakaf tidak bersertifikat, rawan sengketa, sulit dioptimalkan	(Barokah et al., 2025; Putra dan Fildayanti, 2021)
Kurang profesionalisme dan transparansi	Kepercayaan publik rendah, mobilisasi wakaf uang/lembaga tidak optimal	(Gabryella dan Sirait, 2024; Susanti et al., 2025; Sa'ad dan Hamman, 2025)

Dampak langsung dari lemahnya tata kelola ini adalah munculnya celah (gap) besar antara besarnya potensi wakaf (uang dan tanah) dengan pemanfaatan produktifnya untuk sektor krusial seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial (Gabryella, 2024; Hakim dan Nawawi, 2024; Putra et al., 2025; Susanti et al., 2025). Lemahnya manajemen lembaga dan kapasitas wali amanat (*trustee*) ini juga ditemukan di konteks negara lain seperti Arab Saudi dan Nigeria, yang terbukti menghambat kontribusi wakaf pada skala nasional dan menurunkan kepercayaan donatur (Kassim dan Noordin, 2025; Sa'ad dan Hamman, 2025). Oleh karena itu, diperlukan reposisi paradigma dan peningkatan literasi publik guna menggeser orientasi wakaf dari sekadar ibadah ritual-fisik menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang agresif (Barokah et al., 2025; Kasri dan Chaerunnisa, 2022; Ritonga, 2025).

Penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui pengembangan sebuah instrumen pengukuran yang komprehensif bernama Indeks Wakaf Wilayah (IWW). Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung bersifat kualitatif atau berfokus pada dimensi tunggal, IWW dirancang sebagai indeks komposit multidimensi yang mengintegrasikan tiga pilar utama: literasi (kesadaran), kuantitas (jumlah pemberi wakaf), dan kapasitas (nilai ekonomi/kemampuan finansial). Kebaruan utama IWW terletak pada pergeseran unit analisis ke tingkat kabupaten/kota, berbeda dengan Indeks Literasi Wakaf (ILW) dari BWI yang masih berfokus pada agregasi skala nasional atau provinsi.

Selain kebaruan pada unit analisis, IWW tidak memakai pendekatan konvensional namun mengadopsi metode agregasi rata-rata geometrik (*geometric mean*) yang mengacu pada kerangka kerja OECD (2008), bukan menggunakan rata-rata aritmatika sederhana. Pendekatan geometrik ini secara metodologis memastikan bahwa kinerja yang rendah pada salah satu dimensi—baik literasi, kuantitas, maupun kapasitas—tidak dapat dikompensasi secara penuh oleh dimensi lainnya. Dengan demikian, model ini mampu menyajikan potret ekosistem wakaf daerah yang jauh lebih adil, robust, dan objektif. Fokus lokus pada Provinsi Banten sekaligus memberikan perspektif unik mengenai dinamika wilayah yang memiliki perpaduan kontras antara pusat industri modern yang padat modal dan wilayah rural-periferi dengan corak keagamaan yang kental. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengembangkan kerangka kerja dan indikator pembentuk Indeks

Wakaf Wilayah yang valid dan handal berdasarkan standar metodologi indeks komposit internasional (OECD, 2008); (2) Menganalisis tingkat literasi, kuantitas, dan kapasitas wakaf di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten; (3) Menghitung dan memetakan nilai Indeks Wakaf Wilayah (IWW) untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan potensi wakaf antar daerah; dan (4) Memberikan rekomendasi kebijakan komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen pendukung kemandirian daerah dalam penyediaan barang publik.

METODE PENELITIAN

Lokus Dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten dengan unit analisis mencakup 8 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Pemilihan lokus ini didasarkan pada karakteristik wilayah Banten yang memiliki variasi tingkat urbanisasi dan kapasitas ekonomi yang kontras, namun memiliki akar budaya religiusitas yang kuat. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengonstruksi Indeks Wakaf Wilayah (IWW) sebagai representasi kekuatan potensi wakaf daerah.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei literasi wakaf yang dilakukan terhadap masyarakat di Provinsi Banten (246 responden) menggunakan instrumen kuesioner terstruktur yang telah divalidasi. Sebaran reresponden sebagaimana pada Tabel 2. Pengumpulan data menggunakan metode *stratified accidental sampling* dalam menetapkan sampel responden di lapangan. Pengelompokkan berbasis strata wilayah dilakukan terlebih dahulu untuk mengakomodasi heterogenitas kapasitas ekonomi antar-daerah, dan pengambilan sampel pada tiap strata mengandalkan teknik aksidental, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria inklusi yang kebetulan ditemui di lokasi penelitian. Penggunaan teknik kombinasi non-probabilitas ini didasarkan pada landasan metodologis dari Creswell dan Creswell (2018) serta Saunders dkk. (2019), yang menjadikannya sebagai instrumen penarikan sampel yang robust untuk penelitian survei kontemporer ketika peneliti dihadapkan pada keterbatasan akses data populasi yang rigid di level lokal.

Meskipun representasi sampel primer di beberapa kabupaten/kota relatif kecil, hal tersebut tidak menggugurkan validitas penilaian Indeks Wakaf Wilayah (IWW). Berdasarkan kerangka metodologi indeks komposit, dimensi kesadaran (data primer) tidak berdiri sendiri, melainkan dikombinasikan dengan data sekunder makroekonomi yang objektif menggunakan metode pembobotan seimbang (*equal weighting*) dan agregasi rata-rata geometrik (*geometric mean*). Pendekatan geometrik ini secara otomatis mengeliminasi efek substitusi ekstrem sehingga hasil akhir indeks komposit tetap robust, objektif, dan mencerminkan keseimbangan potensi riil daerah.

Tabel 2. Jumlah Responden menurut lokasi

Kab/Kota	Frekuensi
1. Kab Lebak	3
2. Kab Pandeglang	7

3. Kab Serang	3
4. Kab Tangerang	37
5. Kota Cilegon	2
6. Kota Serang	12
7. Kota Tangerang	41
8. Kota Tangerang Selatan	141
Total	246

Data sekunder bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tahun 2018-2020, data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, serta laporan keuangan daerah dari Kementerian Keuangan untuk variabel PDRB per kapita dan kemandirian fiskal.

Uji Chi-Kuadrat (Perbedaan Peruntukan Wakaf dan Wilayah)

Sebelum melakukan pemetaan spasial potensi wakaf, diperlukan pembuktian statistik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan preferensi peruntukan objek wakaf di setiap kabupaten/kota yang diteliti. Untuk kebutuhan tersebut, uji independensi Chi-kuadrat (χ^2) diterapkan menggunakan tabel kontingensi berukuran $r \times k$ guna menguji hipotesis berikut:

H_0 : Tidak ada perbedaan peruntukan wakaf antar-kabupaten/kota di Provinsi Banten.

H_1 : Ada perbedaan peruntukan wakaf antar-kabupaten/kota di Provinsi Banten[cite: 1].

Secara matematis, statistik uji Chi-kuadrat dihitung melalui rumus:

$$\chi^2 = \sum_{i,j=1}^{r,k} \frac{(o_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \dots \dots \dots (1)$$

di mana o_{ij} merupakan frekuensi observasi riil di lapangan, dan e_{ij} adalah frekuensi harapan yang diturunkan dari perkalian total baris dan kolom dibagi total observasi. Keputusan menolak H_0 diambil jika nilai $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$ pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ atau jika $P\text{-value} < 0,05$.

Uji ini menjadi prasyarat mutlak (*pre-requisite*) dalam studi IWW. Jika H_0 ditolak, hal tersebut membuktikan secara empiris bahwa preferensi peruntukan wakaf (seperti masjid, sekolah, makam, atau usaha produktif) di Banten bersifat heterogen dan terikat kuat pada karakteristik regional masing-masing wilayah, sehingga pemetaan spasial lebih lanjut menjadi valid untuk dilakukan.

Analisis Korespondensi /Correspondence Analysis (Memetakan Hubungan Asosiatif)

Meskipun uji Chi-kuadrat mampu mendeteksi adanya keterkaitan antar-variabel, uji tersebut belum bisa mengidentifikasi jenis objek wakaf apa yang menjadi keunggulan atau ciri khas dominan di tiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, Analisis Korespondensi (CA) digunakan sebagai teknik multivariat untuk memetakan hubungan asosiatif antara kategori wilayah dan jenis peruntukan tersebut ke dalam ruang berdimensi rendah (*2D perceptual map*).

Metode ini mereduksi kompleksitas data dengan mentransformasikan matriks proporsi ($P = \frac{1}{n}X$) dan menghitung deviasi dari independensi statistik melalui pendekatan *Chi-square distance*:

$$S_{ij} = \frac{p_{ij} - r_i c_j}{\sqrt{r_i c_j}} \dots \dots \dots (2)$$

Melalui dekomposisi nilai singular (SVD) terhadap matriks sisaan terstandarisasi ($S = U\Sigma V^T$), total inersia (varians) diekstraksi ke dalam koordinat utama baris (F) dan kolom (G) untuk menghasilkan peta persepsi (*biplot*).

Dalam studi IWW di Banten, Analisis Korespondensi sangat krusial karena visualisasi peta persepsi ini secara langsung memisahkan wilayah ke dalam klaster-klaster spesifik berdasarkan kedekatan karakteristiknya terhadap objek wakaf tertentu. Sebagai contoh, analisis ini secara faktual mampu mengelompokkan wilayah rural-tradisional yang dominan memilih objek wakaf konvensional (masjid/musholla), terpisah dari wilayah urban-industri yang memiliki kapasitas ekonomi untuk mendorong alokasi wakaf strategis/produktif. Hasil pemetaan ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan mobilisasi dana sosial Islam yang presisi dan sesuai dengan tipologi lokal masing-masing daerah.

Alat Analisis: Indeks Komposit (OECD, 2008)

Penghitungan IWW menggunakan metode indeks komposit yang mengacu pada kerangka kerja *Handbook on Constructing Composite Indicators* (CI) yang diterbitkan oleh OECD (2008). Penggunaan indeks komposit bertujuan untuk merangkum realitas yang kompleks dan multidimensi dari potensi wakaf wilayah menjadi satu nilai tunggal yang dapat diperbandingkan antar wilayah (benchmarking). Secara matematis, CI merupakan kombinasi dari indikator-indikator penyusun suatu model. Agregasi dilakukan dengan menghitung rata-rata geometris untuk memastikan bahwa kinerja yang rendah pada satu dimensi tidak dapat dikompensasi secara penuh oleh dimensi lainnya, sehingga mencerminkan keseimbangan potensi (Rama dan Yusuf, 2019)

Tahapan Penyusunan Indeks

Tahapan penyusunan IWW meliputi empat langkah utama sebagai berikut: (1) **Identifikasi Variabel:** Penentuan dimensi dan indikator berdasarkan studi literatur dan proyeksi logis potensi wakaf. Dimensi yang ditetapkan adalah Kesadaran/Awareness, Kuantitas/Quantity, dan Kapasitas/Capacity (BWI, 2020), diuraikan sebagaimana pada Tabel 3 ; (2) **Normalisasi Data:** Dikarenakan data penyusun memiliki satuan yang berbeda (misalnya skor kuesioner, jumlah jiwa, dan nilai rupiah), maka dilakukan normalisasi menggunakan metode *Min-Max* agar data memiliki rentang nilai 0 hingga 1; (3) **Pembobotan:** Pada penelitian ini, setiap dimensi diberikan bobot yang sama (equal weighting) untuk menghindari subjektivitas yang berlebihan, mengingat ketiga pilar tersebut dianggap memiliki urgensi yang setara dalam membangun ekosistem wakaf; (4) **Agregasi:** Penggabungan dimensi dilakukan menggunakan rata-rata geometrik (geometric mean).

Tabel 3. Dimensi pembentuk IWW

Dimensi	Indikator	Metode Pengukuran
Kesadaran (Awareness)	Indeks Literasi Wakaf (ILW)	Skala Likert berdasarkan pengetahuan syariah dan regulasi wakaf.
Kuantitas (Quantity)	Indeks Kuantitas Wakaf (IKW)	Rasio penduduk muslim bekerja terhadap total penduduk muslim.
Kapasitas (Capacity)	Indeks Kapasitas Wakaf (IKpW)	PDRB per kapita kabupaten/kota sebagai proksi daya beli.

Metode normalisasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Maximum-Minimum dengan pertimbangan utama adalah kesederhanaan dalam proses perhitungan namun

dengan hasil yang *robust*. Metode Maximum-Minimum menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$I\text{-dimensi}_{ki} = \frac{N_{ki} - N_{k\min}}{N_{k\max} - N_{k\min}} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana $I\text{-dimensi}_{ki}$ adalah nilai indeks dari dimensi ke-k yang diukur pada wilayah ke-i, N_{ki} adalah nilai aktual dari dimensi ke-k dari wilayah ke-i, $N_{k\min}$ adalah nilai terendah dari dimensi ke-k yang ditetapkan, $N_{k\max}$ adalah nilai tertinggi dari dimensi ke-k yang ditetapkan, k adalah : 1,2,3 sedangkan i adalah 1,2,5,6,5,6,7,8. Nilai maksimal untuk penghitungan ILW adalah 22 sedangkan nilai minimalnya adalah 0 (nol). Instrumennya berupa pertanyaan sebagaimana pada Tabel 4.

Nilai maksimal untuk penghitungan IKW ditetapkan menggunakan jumlah penduduk kabupaten tertinggi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan jumlah populasi muslim terbesar yaitu sebesar 2,454,195 jiwa (Jumlah penduduk bekerja Kabupaten Bogor sebesar 2,538,637 jiwa dengan prosentase muslim kabupaten Bogor sebesar 96.7%). Sedangkan nilai minimal ditetapkan sebesar 0 (nol).

Tabel 4. Instrumen pengukuran indeks literasi wakaf (ILW)

Pertanyaan	Jawaban Ya = 1; Tidak = 0	Jawaban Benar =1 Salah = 0
1. Apakah anda mengetahui terdapat ajaran WAKAF dalam Agama Islam		
2. Menurut anda wakaf sama saja dengan zakat dan Infaq		
3. Menurut anda Objek wakaf dapat berupa [Makanan dan minuman]		
4. Menurut anda Objek wakaf dapat berupa [Uang atau logam mulia]		
5. Menurut anda Objek wakaf dapat berupa [Tanah atau bangunan]		
6. Menurut anda Objek wakaf dapat berupa [Hak kekayaan intelektual,]		
7. Menurut anda harta yang sudah diwakafkan [Boleh diperjualbelikan]		
8. Menurut anda harta yang sudah diwakafkan [Dapat dihibahkan/Alih kepemilikan]		
9. Menurut anda harta yang sudah diwakafkan [Boleh diwariskan]		
10. Menurut anda harta yang sudah diwakafkan [Dapat dikembalikan ke pemilik sesuai perjanjian]		
11. Menurut anda obyek wakaf tidak bergerak dapat berupa [Masjid/Musholla]		
12. Menurut anda obyek wakaf tidak bergerak dapat berupa [Sekolah]		
13. Menurut anda obyek wakaf tidak bergerak dapat berupa [Fasilitas kesehatan]		
14. Menurut anda obyek wakaf tidak bergerak dapat berupa [Fasilitas umum lainnya]		
15. Menurut anda wakaf dapat disalurkan melalui [Dimasukkan ke dalam kotak amal masjid]		
16. Menurut anda wakaf dapat disalurkan melalui [Diberikan langsung kepada fakir miskin]		
17. Menurut anda wakaf dapat disalurkan melalui [Perorangan yang bertindak sebagai pengelola]		
18. Menurut anda wakaf dapat disalurkan melalui [Lembaga pengelola wakaf]		
19. Menurut anda penyerahan obyek/harta Wakaf dapat melalui		
20. Apakah anda pernah mengetahui adanya lembaga “Badan Wakaf Indonesia”		

Pertanyaan	Jawaban Ya = 1; Tidak = 0	Jawaban Benar =1 Salah = 0
?		
21. Apakah anda mengetahui terdapat lembaga sosial yang menerima wakaf?		
22. Apakah anda mengetahui bahwa wakaf uang dapat dibayarkan melalui lembaga keuangan syariah?		
Skor		22 (maks)

Nilai maksimal untuk IKpW ditetapkan menggunakan pendapatan perkapita penduduk kabupaten tertinggi di Indonesia pada tahun 2019. Tercatat Kabupaten Kutai Timur menjadi kabupaten dengan pendapatan perkapita terbesar yaitu sebesar Rp.355.55 juta/tahun. Sedangkan nilai minimal ditetapkan menggunakan nilai garis kemiskinan nasional pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 5.103 juta/tahun.

Pembobotan (*weighting*) menggunakan metode *Proportional Equal Weighting*. Metode ini memungkinkan untuk memberikan bobot yang sama pada tiap komponen pengukuran. Selanjutnya tahapan agregasi, yakni untuk memperoleh nilai indeks wakaf wilayah (IWW) yang merupakan agregasi dari ketiga dimensi. Penghitungan IWW dengan dengan penggunaan rata-rata *geometric* ditulis dalam persamaan rumus sebagai berikut :

$$IWW = \sqrt[3]{I - dimensi_1 * I - dimensi_2 * I - dimensi_3} \dots\dots\dots(4)$$

Selanjutnya, skor indeks dikelompokkan kedalam empat kategori yang menunjukkan tingkat capaian sebagaimana skala berikut ini :

- 0.00 < IWW ≤ 0.25 : Kurang
- 0.25 < IWW ≤ 0.50 : Cukup
- 0.50 < IWW ≤ 0.75 : Baik
- 0.75 < IWW ≤ 1.0 : Sangat baik

Penghitungan IWW dengan dengan penggunaan rata-rata *geometric* untuk mengeliminasi efek substitusi antar dimensi dalam penghitungannya. Penggunaan rumus rata-rata geometrik dalam penghitungan IWW menyiratkan pesan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji hubungan variabel wilayah dan peruntukan wakaf

Uji independensi dilakukan sebelum analisis korespondensi untuk membuktikan hipotesis bahwa terdapat perbedaan dalam pemilihan peruntukan obyek wakaf pada wilayah kabupaten/kota yang diteliti. Pengujian independensi dilakukan dengan menggunakan statistik uji chi-kuadrat.

Dibuat hipotesis untuk pengujian sebagai berikut :

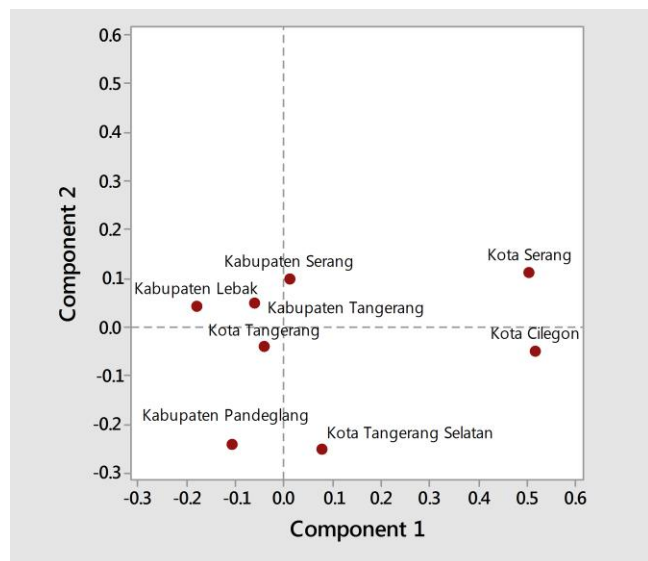
- H₀ : Tidak ada perbedaan peruntukan wakaf pada kabupaten/kota
- H₁ : Ada perbedaan peruntukan wakaf pada kabupaten/kota

Hasil pengolahan data (memberikan nilai P-value uji chi-kuadrat sebesar 0.0000 maka diambil keputusan menolak H₀ dan disimpulkan ada perbedaan peruntukan wakaf pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten (Tabel 5).

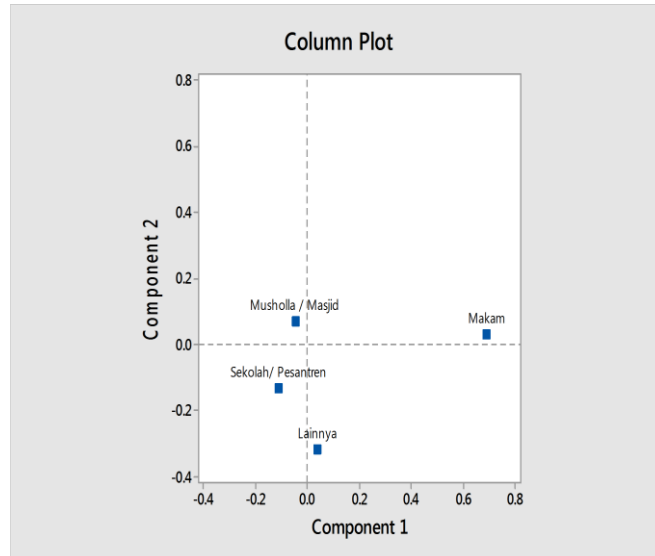
Tabel 5. Uji independensi peruntukan wakaf dengan menggunakan uji chi-kuadrat.

Pearson Chi-Square	847.009	P-Value	0.000
df	21		
Likelihood Ratio Chi-Square	736.444	P-Value	0.000
df	21		

Hasil pengujian ini belum memberikan informasi peruntukan obyek wakaf mana yang menjadi unggulan dari kabupaten/kota tersebut, maka digunakan analisis korespondensi. Berdasarkan analisis korespondensi maka dihasilkan gambar peta persepsi (*perceptual map*) yang dapat dilihat dalam gambar 1 sampai dengan gambar 2. Melalui peta persepsi tersebut dapat diketahui secara visual ada tidaknya ciri khas (dominasi) suatu kabupaten/kota dari suatu obyek wakaf terhadap kabupaten/kota yang lain, dan juga dapat diketahui secara visual ada tidaknya ciri khas (dominasi) suatu obyek wakaf dari kabupaten/kota terhadap obyek wakaf yang lain.



Gambar 1. Peta persepsi profil kabupaten/kota Provinsi Banten



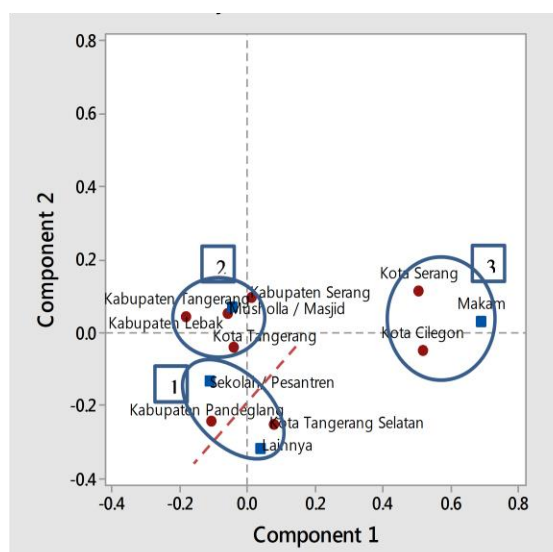
Gambar 2. Peta persepsi profil kabupaten/kota Provinsi Banten

Berdasarkan Gambar 1 diatas profil kabupaten/kota terdapat tiga kelompok kabupaten/kota yang cenderung mempunyai karakteristik yang sama satu dengan lainnya. Kota Serang dan Kota Cilegon dalam satu kelompok. Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan dalam kelompok kedua dan Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang pada kelompok ketiga.

Untuk profil jenis obyek wakaf yang ditampilkan pada Gambar 2 di atas terlihat bahwa obyek wakaf tidak membentuk kelompok (berdekatan) satu dengan yang lain. Artinya setiap obyek wakaf yaitu musholla/masjid, sekolah/pesantren, makam dan kelompok lainnya memiliki karakteristik masing masing yang dapat membedakan pada setiap kabupaten/kotanya.

Gambar 3 adalah diagram gabungan (*overlay*) dari Gambar 1 dan Gambar 2, menjelaskan hubungan kedekatan antara karakteristik kabupaten /kota dengan obyek wakafnya. Berdasarkan hubungan kedekatan tersebut terdapat tiga kelompok yaitu kelompok pertama adalah kabupaten/kota yang mempunyai kedekatan dengan obyek wakaf sekolah/pesantren dan lainnya. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kelompok ini adalah Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan. Kelompok ini dibagi dua oleh garis putus-putus yang memperlihatkan bahwa disebelah kiri adalah kabupaten/kota yang mempunyai kedekatan dengan jenis obyek wakaf sekolah/pesantren dan disebelah kanan adalah kabupaten/kota yang mempunyai kedekatan dengan jenis obyek wakaf lainnya.

Kelompok kedua adalah kabupaten/kota yang memiliki kedekatan dengan jenis obyek



Gambar 5.4 Peta persepsi profil kabupaten/kota Provinsi Banten dengan obyek wakaf

Gambar 3. Peta persepsi profil kabupaten/kota Provinsi Banten dengan obyek wakaf

wakaf masjid/musholla, yang terdiri dari Kabupaten Lebak, Serang, Tangerang dan Kota Tangerang. Kelompok ketiga adalah kelompok kabupaten/kota yang memiliki kedekatan dengan obyek wakaf makam. Terdiri dari Kota Serang dan Cilegon.

Indeks Wakaf Wilayah

Indeks wakaf wilayah (IWW) dimaksudkan untuk mengetahui potensi kekuatan wakaf pada suatu wilayah. Nilai IWW selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai faktor faktor yang dapat memberikan insentif dan hambatan dalam suatu wilayah dalam pengembangan wakaf.

IWW pada penelitian ini dihitung pada unit analisis kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten dengan menggunakan persamaan 2. Nilai indeks dari masing masing dimensi dihitung menggunakan rumus pada persamaan 1.

Indeks Literasi Wakaf (ILW)

ILW adalah indikator yang mengukur pengetahuan responden atas aturan (*syariat*) mengenai wakaf. ILW diukur menggunakan instrumen pengukuran kuesioner yang diambil dari survei pada

wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2020. Nilai skor didapatkan dari rata-rata skor responden pada suatu kabupaten/kota.

Proses normalisasi untuk kabupaten Pandeglang dapat dihitung menggunakan persamaan 3 sebagai berikut :

$$ILW_{(Kab.Pandeglang)} = \frac{15.57-0}{22-0} = 0.70779$$

Dengan cara yang sama, untuk kabupaten/kota lainnya dapat dilakukan penghitungan normalisasi. Hasil perhitungan proses normalisasi merupakan nilai ILW untuk masing-masing wilayah kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Indeks literasi wakaf (ILW) menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Skor	Normalisasi (ILW)
Kab Pandeglang	15.57	0.70779
Kab Lebak	15.00	0.68182
Kab Tangerang	16.38	0.74447
Kab Serang	17.67	0.80303
Kota Tangerang	16.29	0.74058
Kota Cilegon	17.50	0.79545
Kota Serang	17.75	0.80682
Kota Tangerang Selatan	16.56	0.75274

Kota Serang mendapatkan ILW tertinggi dan Kabupaten Lebak menunjukkan nilai IKW terendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Serang adalah wilayah kabupaten/kota yang masyarakatnya memiliki literasi wakaf yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di wilayah Provinsi Banten. Sedangkan Kabupaten Lebak menunjukkan kondisi yang sebaliknya.

Secara umum hasil ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di wilayah banten telah memiliki literasi yang baik terhadap wakaf. Hanya pada Kabupaten Lebak saja yang masih berada pada nilai dibawah 0.7 (70%).

Indeks Kuantitas Wakaf (IKW)

Indeks kuantitas wakaf (IKW) dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar potensi wakaf dalam suatu wilayah bisa didapatkan dengan mengacu pada jumlah populasi penduduk muslim bekerja. Data tahun 2019 untuk Kabupaten Pandeglang didapatkan nilai jumlah populasi muslim bekerja sebesar 468,444 jiwa. Proses normalisasi untuk kabupaten Pandeglang dapat dihitung menggunakan persamaan 1 sebagai berikut :

$$IKW_{(Kab.Pandeglang)} = \frac{468,444-0}{2,454,195-0} = 0.19$$

Dengan cara yang sama, untuk kabupaten/kota lainnya dapat dilakukan penghitungan normalisasi. Hasil perhitungan proses normalisasi merupakan nilai IKW untuk masing masing wilayah kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Tabel 7. Kabupaten Tangerang mendapatkan IKW tertinggi dan Kota Cilegon menunjukkan nilai IKW terendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang berpotensi secara kuantitatif memiliki jumlah *wakif* terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di wilayah Provinsi Banten. Sedangkan Kota Cilegon menunjukkan kondisi yang sebaliknya.

Tabel 7. Indeks kuantitas wakaf (IKW) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2019

Kabupaten/Kota	Populasi Muslim Bekerja (jiwa)	Normalisasi (IKW)
Kab Pandeglang	468,444	0.19
Kab Lebak	531,875	0.22
Kab Tangerang	1,577,871	0.64
Kab Serang	601,351	0.25
Kota Tangerang	908,110	0.37
Kota Cilegon	175,405	0.07
Kota Serang	276,963	0.11
Kota Tangerang Selatan	698,731	0.28

Indeks Kapasitas Wakaf (IKpW)

Nilai IKpW dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar potensi wakaf dalam suatu wilayah yang didapatkan dengan mengacu pada besar nilai pendapatan perkapita penduduk. Dimensi kapasitas wakaf wilayah menggambarkan potensi besaran nilai wakaf yang dapat dikumpulkan dalam suatu wilayah. Data tahun 2019 untuk Kabupaten Pandeglang didapatkan nilai jumlah PDRB perkapita sebesar 23.37 juta/tahun. Proses normalisasi untuk Kabupaten Pandeglang dapat dihitung menggunakan persamaan 1 sebagai berikut :

$$IKW_{(Kab.Pandeglang)} = \frac{23.37 - 5.103}{355.55 - 5.103} = 0.0521$$

Tabel 8. Indeks kapasitas wakaf wilayah (IKpW) menurut Kabupaten/Kota tahun 2019

Kabupaten/Kota	PDRB perkapita (juta/tahun)	Normalisasi (IKpW)
Kab Pandeglang	23.37	0.0521
Kab Lebak	22.2	0.0488
Kab Tangerang	37.12	0.0914
Kab Serang	51.01	0.1310
Kota Tangerang	78.59	0.2097
Kota Cilegon	238.44	0.6658
Kota Serang	46.13	0.1171
Kota Tangerang Selatan	47.39	0.1207

Dengan cara yang sama, untuk kabupaten/kota lainnya dapat dilakukan penghitungan normalisasi. Hasil perhitungan proses normalisasi merupakan nilai IKpW untuk masing masing wilayah kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Tabel 8.

Kota Cilegon mendapatkan IKpW tertinggi dan Kabupaten Lebak menunjukkan nilai IKpW terendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Cilegon berpotensi secara kuantitatif memiliki besaran nilai wakaf terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di wilayah Provinsi Banten. Sedangkan Kabupaten Lebak menunjukkan kondisi yang sebaliknya.

Dari perhitungan ketiga indeks wakaf tersebut kemudian dihitung indeks komposit wakaf wilayah (IWW) menggunakan rumus persamaan 2 penghitungan IWW dengan dengan penggunaan

rata-rata *geometric*. Data tahun 2019 untuk Kabupaten Pandeglang didapatkan nilai jumlah PDRB perkapita sebesar 23.37 juta/tahun. Proses normalisasi untuk Kabupaten Pandeglang dapat dihitung menggunakan persamaan 1 sebagai berikut :

$$IWW_{(Kab.Pandeglang)} = \sqrt[3]{ILW_{(Kab.Pandeglang)} * IKW_{(Kab.Pandeglang)} * IKpW_{(Kab.Pandeglang)}}$$

$$IWW_{(Kab.Pandeglang)} = \sqrt[3]{0.708 * 0.191 * 0.052} = 0.192$$

Tabel 9. Indeks wakaf wilayah (IWW) menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	ILW	IKW	IKpW	IWW	Status
1. Kab Pandeglang	0.708	0.191	0.052	0.192	Kurang
2. Kab Lebak	0.682	0.217	0.049	0.194	Kurang
3. Kab Tangerang	0.744	0.643	0.091	0.352	Cukup
4. Kab Serang	0.803	0.245	0.131	0.295	Cukup
5. Kota Tangerang	0.741	0.370	0.210	0.386	Cukup
6. Kota Cilegon	0.795	0.071	0.666	0.335	Cukup
7. Kota Serang	0.807	0.113	0.117	0.220	Kurang
8. Kota Tangerang Selatan	0.753	0.285	0.121	0.296	Cukup

Dengan cara yang sama, untuk kabupaten/kota lainnya dapat dilakukan penghitungan indeks komposit. Hasil perhitungan indeks komposit untuk masing masing wilayah kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada tabel 9. Secara umum dapat digambarkan bahwa potensi kekuatan wakaf di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten terbesar berada di Kota Tangerang dan terendah di Kabupaten Pandeglang.

KESIMPULAN

Indeks Wakaf Wilayah (IWW) sebagai indikator baru mampu merangkum realitas kompleks potensi wakaf di tingkat kabupaten/kota. IWW dibangun secara multidimensi melalui tiga pilar utama: Kesadaran (Awareness), Kuantitas (Quantity), dan Kapasitas (Capacity). Dimana Secara umum menunjukkan bahwa kekuatan potensi wakaf di Provinsi Banten berada pada kategori "Cukup" yakni mencakup 5 dari 8 wilayah (62,5% wilayah). Hal ini menunjukkan bahwa potensi wakaf sudah ada dan teridentifikasi, namun belum mencapai level "Tinggi" atau "Sangat Tinggi" secara merata di seluruh daerah.

Terdapat perbedaan kekuatan potensi yang signifikan antar wilayah. Wilayah urban dan pusat industri (seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan) cenderung memiliki indeks yang lebih tinggi karena dukungan kapasitas ekonomi dan populasi muslim produktif. Sementara wilayah selatan (seperti Pandeglang) memiliki tantangan pada kapasitas finansial meski didukung oleh literasi yang cukup baik.

Wakaf memiliki potensi strategis sebagai instrumen pembiayaan sosial untuk menutupi celah fiskal daerah. Wakaf dapat digunakan untuk membiayai penyediaan barang publik, khususnya perbaikan sarana pendidikan (seperti renovasi ruang kelas rusak) yang selama ini sulit terakomodasi sepenuhnya oleh APBD. Untuk itu rekomendasi dari penelitian ini adalah : (1) Peningkatan Literasi pada Daerah dengan kapasitas ekonomi tinggi yakni dengan edukasi lebih

masif mengenai wakaf uang agar potensi finansial terkonversi menjadi realisasi wakaf (2) Peningkatan Profesionalisme Nazhir untuk penguatan tata kelola lembaga pengelola wakaf agar masyarakat lebih percaya untuk menyalurkan dana melalui instrumen wakaf produktif.; (3) Integrasi Kebijakan, yakni Pemerintah daerah disarankan mulai mempertimbangkan potensi wakaf dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai solusi atas terbatasnya kemandirian fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2020). Provinsi Banten Dalam Angka 2020. BPS Provinsi Banten.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Indeks Literasi Wakaf: Laporan Hasil Survei Nasional. Badan Wakaf Indonesia.
- Baker, R., Brick, J. M., Bates, N. A., Battaglia, M., Couper, M. P., Dever, J. A., and Tourangeau, R. (2013). Summary report of the AAPOR task force on non-probability sampling. *Journal of Survey Statistics and Methodology*, 1(2), 90–143. <https://doi.org/10.1093/jssam/smt008>
- Barokah, K., Ma'rufi, A., dan Abqori, N. (2025). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Entak. *AL-SULTHANIYAH*. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4079>
- Chakrabartty, S. (2024). Geometric mean approach to measure Composite Index. [RMD] *RevistaMultidisciplinar*, 6(1), 109-131. DOI: <https://doi.org/10.23882/rmd.24160>
- Creswell, J. W., dan Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Gabryella, H Sirait. (2024). Productive Waqf Management: Challenges And Opportunities In Islamic Economic Development-A Systematic Literature Review. *Shacral: Shari'ah Economics Review Journal*. <https://doi.org/10.62952/shacral.v1i3.56>
- Ghani, A., dan Aziz, M. (2023). Productive Waqf Asset Management based on Primary Scale and Implications for Community Welfare. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*. <https://doi.org/10.15642/mzw.2023.5.1.85-104>
- Habibi, F. (2017). Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten. 11-22. <https://doi.org/10.30656/sawala.v5i2.469>
- Hadi, M., Rum, J., Maguni, W., dan Radiamoda, A. (2025). Toward a Holistic Legal Framework for Effective Waqf Implementation: Integrating Islamic Socio-Economic Models. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12590>
- Hakim, L., dan Nawawi, K. (2024). Finding Solutions to Productive Waqf Management Problems: A Case in Indonesia. *International Journal of Waqf*. <https://doi.org/10.58968/ijw.v4i1.508>
- Härdle, W. K., dan Simar, L. (2003). *Applied Multivariate Statistical Analysis*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-05802-2>
- Ira, M. (2022). Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. *Formosa Journal of Science and Technology*. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>
- Johnson, R. A., dan Wichern, D. W. (2002). *Applied Multivariate Statistical Analysis* (5th ed.). Prentice Hall.
- Kasri RA, Chaerunnisa SR (2022), "The role of knowledge, trust, and religiosity in explaining the online cash waqf amongst Muslim millennials". *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 13 No. 6 pp. 1334–1350, doi: <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>

- Kassim, A., dan Noordin, K. (2025). Legal And Institutional Framework Of Waqf In Saudi Arabia: Challenges And Alignment With Vision 2030. *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)*. <https://doi.org/10.37231/mjis.2025.9.2.305>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Lehdonvirta, V., Oksanen, A., Räsänen, P., and Blank, G. (2021). Social media, internet, and panel surveys: Non-probability samples in COVID-19 research. *International Journal of Social Research Methodology*, 24(1), 121–129. <https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1755830>
- Munda, G., and Nardo, M. (2009). Non-compensatory/non-linear composite indicators for ranking countries: A conditional geometry approach. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 172(1), 151–164. <https://doi.org/10.1111/j.1467-985X.2008.00555.x>
- Nasution, M. E. (2005). *Proyeksi Potensi Wakaf Nasional*. [Makalah/Laporan Internal].
- OECD/European Union/EC-JRC (2008), *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264043466-en>.
- Prabowo, S. (2025). Analysis Of Primary School Needs In Banten Based On Educational And Fiscal Indicators. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i4.18870>
- Purnama, B., dan Djunaidy, B. P. (2025). Government Policy Strategy On Free Primary And Secondary Education In Banten. *Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains*. <https://doi.org/10.58432/algebra.v5i3.1426>
- Putra, T., , A., dan Sikki, K. (2025). A Comparative Expert-Based Analysis for Prioritizing Waqf Asset Optimization Strategies in Indonesia: An Analytic Network Process (ANP) Approach. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v6i1.10942>
- Putra, T., dan Fildayanti, D. (2021). Revitalization Of Waqf Management For Social Economic Development Of East Luwu. *Al-Risalah*. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1403>
- Rama, Ali and Yusuf, Burhanuddin, Construction of Islamic Human Development Index (2019). *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 32, No. 1, 2019, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3465601>
- Ritonga, R. (2025). Effective Strategies In Overcoming The Challenges Of Wakaf Management: A Study In The Local Leadership Of Muhammadiyah In Pekanbaru City. *Jurnal Al-Iqtishad*. <https://doi.org/10.24014/jiq.v21i1.35979>
- Sa'ad, A., dan Hamman, U. (2025). The Administration And Management Of Islamic Waqf (Endowment) Institutions In Adamawa State: Historical Development And Contemporary Challenges. *International Journal of Research Publication and Reviews*. <https://doi.org/10.55248/gengpi.6.0625.2337>
- Saunders, M., Lewis, P., dan Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students* (8th ed.). Pearson Education.
- Susanti, A., Fatah, D., dan Ali, Z. (2025). An Analysis of Problems and Solutions in the Low Level of Cash Waqf in Indonesia Using Analytic Network Process (ANP). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v19i1.392>

-
- Syafiq, A. (2018). Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 25-40.
- Sylvianie, L. (2023). Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>
- Weiss, N. A. (2017). *Introductory statistics* (10th global ed.). Pearson Education.